

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMKN 1 LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT

Oleh :

Jihan Fakhirah, Leo Agustino

Jihan.fakhirah21@gmail.com

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar adalah bantuan uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepadapeserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya (Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah proses penyaluran serta pencairan dana bantuan yang tidak tepat waktu, sasaran program yang kurang tepat dan monitoring serta sosialisasi yang masih kurang maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menemukan bahwa Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal. Karena kurangnya pengawasan atau sosialisasi dari Dinas pendidikan ke pada pihak sekolah terkait Pelaksanaan program. Saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya adalah meningkatkan sosialisasi terkait program ke sekolah-sekolah, memberikan pengetahuan kepada orang tua atau wali terkait penggunaan dana bantuan, sekolah agar lebih teliti dalam mendata siswa penerima bantuan agar tepat sasaran, serta meningkatkan komunikasi yang aktif antara Dinas Pendidikan dan Sekolah.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi, Program Indonesia Pintar, Ketepatsasaran

ABSTRACT

The Smart Indonesia Program is cash assistance from the government that is given to students whose parents cannot afford to pay for their education (Regulation of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 12 of 2015). The purpose of this study was to evaluate the implementation of the Smart Indonesia Program at SMKN 1 Lembah Melintang, West Pasaman Regency. The problems in this research are the process of distribution and disbursement of aid funds that are not timely, program targets that are not quite right and monitoring and socialization that are still not optimal. The method used in this research is descriptive qualitative research. The researcher uses William N. Dunn's theory with indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The results of the study found that the Evaluation of the Implementation of the Smart Indonesia Program at SMKN 1 Lembah Melintang, West Pasaman Regency, had not been maximized. Due to the lack of supervision or outreach from the education office to the

schools regarding the implementation of the program. Suggestions given by researchers include increasing socialization regarding the program to schools, providing knowledge to parents or guardians regarding the use of aid funds, schools to be more careful in recording student assistance recipients so that they are right on target, and increasing active communication between the Education Office and School.

Keywords: Implementation Evaluation, Smart Indonesia Program, on target

PENDAHULUAN

Pendidikan Merupakan proses penting dalam meningkatkan keterampilan dasar seorang anak. Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan teknis yang memadai, serta pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk menciptakan cendekiawan yang gemilang. Untuk itu diperlukan kesamaan hak bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan serta program kerja yang operasional secara sistematis, sosial, serta budaya untuk mempengaruhinya. Namun pendidikan di Indonesia yang rendah masih menjadi masalah dalam mengembangkan generasi bangsa ini.

Masalah-masalah multi dimensional yang memperkeruh pengembangan kualitas maupun kuantitas pendidikan di Indonesia, tak jauh-jauh dari kurangnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat, ketimpangan akses di wilayah pinggiran, kesenjangan kelas sosial ekonomi, sarana, prasarana, sumber daya manusia, finansial dan masalah lainnya tetap terjadi. Bahkan diperburuk lagi dengan munculnya kasus korupsi anggaran pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31

tentang pendidikan menerangkan, ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia adalah hal utama yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya program yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan dan menjamin pendidikan rakyat Indonesia khususnya bagi warga yang memiliki

tingkat perekonomian yang rendah, diantaranya :

1. Membangun gedung sekolah dan sarana penunjangnya.
2. Memberikan anggaran pendidikan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
3. Wajib belajar bagi seluruh anak berusia 7 sampai dengan 12 tahun.
4. Memberikan beasiswa pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

TINJUAN PUSTAKA

Pengertian Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa : “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakandalam arti satuan nilainya. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Rorong, 2020).

Evaluasi atau penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu kebijakan yang diterapkan, untuk menentukan kebijakan yang dijalankan sudah berjalan baik atau belum, dan mempermudah para pengambil keputusan untuk melakukan revisi terhadap kebijakan yang sekiranya kurang berjalan baik. Evaluasi menjadi penilai kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik, untuk kedepannya dapat meminimalisir kesenjangan yang terjadi

agar kebijakan publik yang diterapkan bisa berjalan dengan baik.

Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Evaluasi juga memiliki tujuan dan fungsi seperti yang dijelaskan oleh para ahli, salah satunya dikemukakan oleh Subarsono (2012:120- 121) di dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, Aplikasi. Berikut beberapa tujuan yang dikemukakan, yaitu:

1. Menentukan tingkat kinerja kebijakan yaitu derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi kebijakan karena melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) kebijakan yaitu mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran (*output*) dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan yaitu melihat dampak dari suatu kebijakan baik dampak positif maupun dampak negatif;
5. Untuk mengetahui adanya penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dengan cara membandingkan antara dan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target dan
6. Menjadi bahan masukan (*input*) untuk kebijakan berikutnya sehingga dihasilkan kebijakan yang lebih baik

Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Pendekatan teori evaluasi kebijakan dijabarkan memiliki 3 pendekatan seperti yang dikemukakan oleh Dunn (2003: 611-619), yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Berikut pendekatan yang dijelaskan oleh Dunn:

1. Pertama yaitu Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*). Adalah pendekatan yang menggunakan metode - metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berupaya untuk menanyakan manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti (*self evident*) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi semu, analisis secara khusus menerapkan bermacam- macam metode untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan proses. Tetapi setiap hasil kebijakan yang ada diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat.
2. Kedua yaitu Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya, tentang hasil-hasil kebijakan. Namun demikian evaluasi dilakukan atas dasar tujuan program yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama

dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal, merupakan

3. Ketiga adalah evaluasi keputusan teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*) yaitu pendekatan evaluasi dengan menggunakan metode deskriptif dalam menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh stakeholders. Pendekatan keputusan teoritis berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh stakeholders (Maelin, 2018).

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan bagaimana hasil penelitian tentang Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dengan berbagai indikator di dalamnya, serta unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir- butir rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, maka digunakanlah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, studi wawancara, serta studi kepustakaan.

Wawancara dilakukan kepada

beberapa guru yang menjadi petugas pelaksana PIP di SMKN 1 Lembah Melintang dan juga kepada beberapa siswa penerima PIP. Wawancara dilakukan secara berkala dalam beberapa bulan yang mana terdapat beberapa wawancara yang dilakukan secara offline dan juga online karena keterbatasan waktu dan jarak. Terakhir guna menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode triangulasi. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan data lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang peneliti miliki sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada masalah yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara terperinci dan ringkas kedalam identifikasi masalah. Jadi, ruang lingkup pada penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMKN 1 Lembah Melintang.

Pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan daya tarik, keunikan, dan kesesuaian fokus penelitian yang dipilih. Memilih tempat ini diharapkan dapat menemukan hal-hal baru dan bermakna, serta mencari fenomena sosial dan penelitian. Lokasi penelitian ini berlokasi di Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

Definisi Konsep

Definisi konsep memberikan penjelasan tentang variabel yang ada di dalam suatu penelitian dalam bentuk konsep yang bertujuan untuk membatasi arah dari suatu penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, adapun konsep dari judul penelitian "Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat"

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn, terdapat 6 kriteria/indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah kebijakan berhasil atau tidak, antara lain :

- a. *Effectiveness* atau keefektifan
- b. *Efficiency* atau efisiensi
- c. *Adequacy* atau kecukupan
- d. *Equity* atau kesamaan
- e. *Responsiveness* atau ketanggapan
- f. *Appropriateness* atau ketepatangunaan

2. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bagian dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang diresmikan sejak tanggal 3 November 2014 dan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 2015. Penyelenggaraan pada Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerja sama oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal terkait, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. PIP dilaksanakan dengan dikeluarkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang mana kartu tersebut diberikan sebagai penanda atau identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Program Indonesia Pintar (PIP) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang PIP.

Defenisi Operasional

Pelaksanaan evaluasi kebijakan publik bukanlah suatu hal yang sederhana, karena evaluasi bisa dikaji dari berbagai sudut pandang dan juga tergantung pada siapa yang menilai serta mengintreprestasikannya. Dengan begitu, dalam mengevaluasi suatu program atau strategi maupun kebijakan publik diperlukan adanya suatu indikator untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Terdapat 6 indikator pada teori evaluasi menurut Dunn, yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Yang pertama adalah efektifitas yang dimaksud yaitu bagaimana sasaran dan tujuan yang diharapkan dari kebijakan sudah tercapai atau belum. Dalam indicator efektifitas ini dapat dilihat dari:

- a. Tujuan Kebijakan, dan
- b. Sasaran Kebijakan

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi merupakan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Untuk mengukur efisiensi kebijakan digunakan indikator berikut:

- a. Dari segi biaya
- b. Dari segi waktu, dan
- c. Dari segi tenaga

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas kebijakan memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan masalah.

4. Perataan (*Equity*)

Perataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat suatu kebijakan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan merupakan kebijakan yang akibatnya secara adil didistribusikan.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target (sasaran) kebijakan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat.

Dalam Penelitian tentang Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten

Pasaman Barat yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Sebagai *key instrument*, peneliti mesti memiliki kemampuan dalam metode penelitian kualitatif, etika penelitian, dan kemampuan bidang ilmu yang ditekuni. Menurut Moleong (2007: 9), bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling dan snowball. Hal ini dilakukan untuk maksud dan tujuan tertentu dan mengasumsikan bahwa informan memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian.

PEMBAHASAN

Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator dalam melakukan evaluasi suatu kebijakan publik yang menilai pencapaian dari kebijakan tersebut. Efektivitas berkaitan dengan pertanyaan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, atau apakah suatu kebijakan telah mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan atau ditetapkan (Dunn, 2000:492). Artinya efektivitas merupakan ukuran tingkat pencapaian target dan tujuan. Semakin tinggi pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan, maka kebijakan dinilai semakin efektif. Selain itu, kebijakan dinilai efektif ketika terjadi perubahan menjadi lebih baik dengan adanya kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, evaluasi Program Indonesia Pintar dinilai dari pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

Keefektivitasan program Indonesia di SMKN 1 Lembah Melintang yang menekankan tujuan kebijakan dan sasaran kebijakan, maka Program Indonesia Pintar SMKN 1 Lembah Melintang telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tujuan Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat merupakan penyempurna dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan dari program ini adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah serta memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Adapun tujuan dan sasaran pada Program Indonesia Pintar ini, tujuan utama dari Program Indonesia Pintar untuk mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak dalam mengakses fasilitas dan layanan pendidikan yang lebih baik, mengurangi angka putus sekolah, serta membantu anak serta orang tua dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran sekolah, mengurangi biaya personal pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu.

Sebuah program dikatakan berhasil jika sasaran utama program tepat. Dimana di program ini kriteria sasaran program adalah anak sekolah usia 6 hingga 21 tahun. Peserta didik merupakan pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar). Peserta didik berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan. Peserta didik

dari keluarga Kartu Keluarga Sejahtera. Peserta didik merupakan anak yatim piatu/yatim/piatu/panti asuhan. Peserta didik terkena dampak bencana alam. Peserta didik tidak bersekolah karena tidak memiliki biaya. Peserta didik memiliki kelainan fisik, korban musibah, orangtua terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berada di daerah konflik hingga berasal dari keluarga terpidana.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sasaran Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program sudah memenuhi indikator efektivitas kebijakan. Dinilai dari tercapainya tujuan yaitu membantu siswa dalam memperoleh kebutuhan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah serta sasaran program yang tepat yaitu peserta didik yang kurang mampu.

Efisiensi

Kriteria kedua untuk melakukan evaluasi kebijakan adalah efisiensi. Subarsono (2012:120-121) mengemukakan tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengukur tingkat efisiensi kebijakan karena melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Dunn (2000:430) mengemukakan bahwa efisiensi juga berkenaan dengan pertanyaan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Dunn, 2006:610). Apabila usaha yang digunakan semakin sedikit, maka suatu kebijakan dinilai

semakin efisien.

Efisiensi program Indonesia di SMKN 1 Lembah Melintang telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dengan aktor pelaksana Program Indonesia Pintar yang saling terkoordinasi diantaranya Dinas Pendidikan, Koordinasi Wilayah di kabupaten, Kepala Sekolah, Kasi Kesiswaan, Operator sekolah, Ketua Komite, Bendahara sekolah, Bimbingan Konseling, Jorong, Siswa penerima KIP, Siswa Non KIP dan orang tua siswa penerima KIP.

Subindikator pertama yang menilai efisiensi program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang adalah pengelolaan SDM. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa SDM yang melaksanakan Program Indonesia Pintar yaitu Dinas pendidikan dan Koordinasi Wilayah dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agen pembantu dalam pelaksana di SMKN1 Lembah Melintang yang terdiri dari Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara, dan operator sekolah yang mengolah data siswa dan mengirimnya ke Dapodik.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan dalam menjalankan Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang adalah dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan yang kemudian di teruskan oleh pihak sekolah kepada wali murid penerima Program Indonesia Pintar, selain itu program Indonesia Pintar juga telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh

siswa yang menerimanya. Kenyataan yang demikian tentunya membuktikan bahwa Program Indonesia Pintar telah berjalan secara prosedural.

Lebih jauh lagi sosialisasi dilakukan oleh pihak sekolah kepada walimurid, dan menjelaskan maksud dari adanya program ini. Setelah itu pihak sekolah mengundang para orang tua murid yang berhak untuk mendapat program bantuan tersebut agar dapat mengetahui pengarahannya. Menurut kepala sekolah proses sosialisasi dilakukan saat penerimaan murid baru, sehingga dirasa wali murid tidak sepenuhnya mengerti dengan penjelasan terkait PIP karena hanya sepintas dijelaskan dan wali murid lebih terfokus pada kegiatan penerimaan siswa baru saja. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan wali murid hanya dilakukan setiap awal tahapan program Indonesia Pintar. Tidak adanya koordinasi secara intensif antara pihak sekolah dengan pihak wali murid berdampak pada secara langsung pada sulitnya sekolah dalam mengendalikan setiap penyalahgunaan dana Indonesia Pintar yang dilakukan oleh wali murid.

Hasil wawancara yang dilakukan beberapa guru di SMKN 1 Lembah Melintang, dimana mereka menemukan adanya penyalahgunaan dana PIP oleh wali murid yang seharusnya dibelikan dibelikan perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, dan sepatu tapi justru dibelanjakan untuk keperluan sehari – hari seperti membeli beras dan uang jajan adik siswa. Hal ini menjadi suatu point penting bagi sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar agar aspek kemanfaatan

dapat dirasakan sebagaimana mestinya.

Terkait Sarana Prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung. Karena dalam hal ini bantuan berupa bantuan langsung tunai, yang mana langsung diberikan ke siswa sehingga tidak membutuhkan sarana dan prasarana tertentu. Lebih tepatnya sekolah memberikan fasilitas dalam mengurus data-data siswa penerima bantuan. Seperti memasukkan data siswa ke Dapodik, atau seperti dulu sekolah membantu siswa dalam mengambil uang ke bank, namun untuk sekarang sudah tidak seperti itu lagi karena adanya peraturan baru PIP dimana pencairan dana dari bank hanya bisa dilakukan oleh siswa bersangkutan.

Indikator selanjutnya untuk menilai efisiensi kebijakan adalah pengelolaan biaya. Dalam pelaksanaan program ini dana anggaran dari Program Indonesia Pintar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan temuan peneliti bahwa dana bantuan yang diterima setiap penerima dana bantuan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dimana dana yang diterima adalah Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 untuk tingkatan SMK dan disalurkan per-2 semester. Untuk penyaluran dana tersebut disalurkan melalui bank BNI yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Indikator penilaian selanjutnya

adalah dari segi waktu. Kecukupan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari awal pendataan siswa hingga SK keluar dan dana dicairkan tidak membutuhkan waktu yang lama karena berkaitan dengan pencairan dana PIP yang selalu cair per -2 semester tiap tahunnya. Namun terdapat sedikit kendala dimana pencairan dana bantuan terkadang berubah- ubah bisa diawal semester ataupun bisa diakhir semester. Yang mana hal ini berdampak pada siswa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya atau terlambat membayar uang sekolah.

Kecukupan

Kecukupan merupakan kriteria yang digunakan untuk melihat seberapa jauh suatu evaluasi kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dari objek kebijakan. Kecukupan berkaitan dengan pertanyaan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah (Dunn, 200: 610). Menurut Langbein dalam Subarsono (2012:126) kecukupan merupakan salah satu sub-indikator dari indikator keadilan distribusi dalam evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini dinilai apakah hasil dari Program Indonesia Pintar dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa yang kurang mampu.

Hasil wawancara terkait kecukupan Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar sangat memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. Hal tersebut terlihat dari

jumlah siswa yang mendaftar sebagai siswa penerima PIP pada tiap tahunnya semakin banyak yang mana itu menandakan Program Indonesia Pintar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Meskipun kuota penerima dana PIP terbatas. Meskipun sudah mencukupi kebutuhan siswa, pelaksanaan PIP harus ditingkatkan lagi, sehingga ditahun selanjutnya kuota penerima bantuan PIP semakin tinggi.

Perataan

Perataan dapat dipahami sebagai keadilan yaitu kesamaan kesempatan setiap orang (sasaran kebijakan publik) untuk menerima manfaat kebijakan serta kesamaan dalam biaya kebijakanehingga tidak ada pihak yang measa dirugikan dengan hasil dari kebijakan yang ada. Setiap kebijakan harus bersifat adil dalam arti semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus sama-sama bisa menikmati hasil kebijakan. Dunn (2000:610) juga mengemukakan perataan berkaitan dengan pertanyaan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda yang berarti perataan merujuk pada distribusi akibat dan usaha secara adil antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.

Perataan atau keadilan Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang dinilai dari pendistribusian biaya dan manfaat Program Indonesia Pintar bagi peserta didik. Pendistribusian biaya dinilai dari apakah biaya Program Indonesia Pintar didistribusikan dengan

merata kepada peserta didik di SMKN 1 Lembah Melintang. Sedangkan pendistribusian manfaat dinilai dari apakah manfaat Program Indonesia Pintar ini didistribusikan dengan merata kepada peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pendistribusian biaya sudah merata bagi seluruh peserta didik. Dimana semua peserta didik yang namanya terdaftar menjadi penerima bantuan PIP memperoleh bantuan yang setara pada masing-masing tingkat kelas yang berbeda.

Berdasarkan wawancara indikator pengawasan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar apakah sudah dilakukan secara merata. Dalam hal pengawasan dari pihak dinas dan sekolah memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik. Hanya saja komunikasi dan sosialisasi ini dilakukan tidak optimal. Sosialisasi menitikberatkan dari pihak sekolah yang menyampaikan langsung kepada orang tua atau wali murid penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Dinas pendidikan hanya mengeluarkan surat edaran saja, dan pihak sekolah mengharapakan dari dinas langsung untuk melakukan sosialisasi secara langsung masuk ke lingkungan sekolah.

Responsivitas

Kriteria responsivitas berkaitan dengan pertanyaan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu (Dunn, 2000:610). Lebih lanjut Dunn (2000:437) juga mengemukakan

bahwa responsivitas merupakan kriteria yang penting karena suatu kebijakan dinilai masih gagal apabila belum mampu menanggapi kebutuhan dari kelompok sasaran kebijakan meskipun sudah memuaskan dari kriteria lainnya.

Responsivitas Program Indonesia Pintar di SMKN 1 lembah melintang dinilai dari kepuasan peserta didik terhadap Program Indonesia Pintar dan tanggapan terhadap program. Responsivitas juga dapat dinilai melalui dampak yang ditimbulkan oleh Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dilakukannya evaluasi menurut Subarsono (2012:120-121) yaitu mengukur dampak suatu kebijakan yaitu melihat dampak dari suatu kebijakan baik dampak positif maupun negative.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta didik sangat puas dengan adanya Program Indonesia Pintar. Tingkat kepuasan tersebut ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan dana PIP. Alasan siswa merasa puas dengan program ini karena dengan adanya Program Indonesia Pintar siswa merasa terbantu sekali dalam hal membeli perlengkapan sekolah, dapat meringankan beban orang tua dalam membayar uang sekolah, mendapat tambahan uang saku dan membeli seragam sekolah.

Dampak positif dari Program Indonesia Pintar dinilai positif karena program ini mampu menurunkan angka putus sekolah dan membantu siswa

memenuhi kebutuhan pendidikannya. Hasil dari program ini adalah membantu siswa meneruskan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang sudah memenuhi kriteria responsivitas kebijakan. Atau dengan kata lain, Program Indonesia Pintar dinilai responsive terhadap kebutuhan peserta didik di SMKN 1 Lembah Melintang. Hasil dari Program Indonesia Pintar sendiri adalah menurunnya angka putus sekolah di SMKN 1 Lembah Melintang dan Program PIP juga membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya.

Ketepatan

Ketepatan merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan sudah tepat sasaran atau tidak. Artinya yang menjadi objek kebijakan harus tepat dengan tujuan kebijakan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Wibawa, dkk dalam (Nugraha, 2014:715-716) yaitu fungsi evaluasi untuk audit, artinya melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru terdapat penyimpangan. Ketepatan berkaitan dengan pertanyaan apakah tujuan atau hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai (Dunn, 2000:610). Ketepatan juga merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program serta merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pada indikator ini terdapat kesimpulan, kurangnya kemampuan pelaksana program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang yaitu Kepala sekolah dan Operator berdampak pada salah sasaran dari Program Indonesia Pintar. Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwasanya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kelompok sasaran. Permasalahan tersebut mengenai salah sasaran dalam penerimaan dan bantuan yang dimana siswa yang mendapat bantuan adalah siswa yang sebenarnya adalah siswa yang tidak mampu dan siswa yang belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Namun dalam hal ini terdapat pembatasan yaitu kuota yang mendapat bantuan, maka lebih diutamakan untuk siswa yang benar-benar berhak dan siswa tidak mampu sekaligus belum pernah mendapatkan bantuan dari program Indonesia Pintar.

Menurut observasi peneliti, koordinasi maupun kerjasama antara kepala sekolah dengan operator sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih kurang baik. Hal tersebut dilihat dengan adanya ketidaktepatan sasaran penerima kartu Indonesia Pintar. Adanya ketidaktepatan dalam penentuan penerima Program Indonesia Pintar, sedikit banyaknya menggambarkan bahwa sekolah dan tim operator masih kurang selektif dan kooperatif dalam memilih siapa saja siswa yang layak mendapatkan bantuan Program

Indonesia Pintar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dianalisis melalui evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan dengan kesimpulan bahwa Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang belum maksimal dikarenakan dalam kurangnya pengawasan atau sosialisasi dari Dinas pendidikan ke pada pihak sekolah terkait Pelaksanaan program, tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan siswa kurang mampu karena realistis dengan kebutuhan mereka yang tidak akan ada cukupnya, apalagi dengan jumlah bantuan yang tidak besar. Pihak dinas dan sekolah memiliki komunikasi dan koordinasi yang kurang optimal. ketidaktepatan sasaran penerima bantuan Program Indonesia Pintar, pengawasan atau sosialisasi dari Dinas pendidikan ke pada pihak sekolah terkait Pelaksanaan program yang masih kurang. hal ini tidak dilakukan secara maksimal dan dapat menyebabkan salah paham atau kurang mengertinya wali murid

Saran

Wali siswa diharapkan

berpartisipasi aktif terkait penerapan sosialisasi Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Lembah Melintang, dengan cara selalu mengikuti rapat yang diadakan oleh pihak sekolah terkait Program Indonesia Pintar, bertanya kepada anak terkait perkembangan Program Indonesia Pintar yang ada di sekolah, sehingga wali siswa mengerti fungsi serta bagaimana penggunaan dana bantuan PIP.

1. Sekolah lebih teliti dalam mendata siswa, mengadakan sosialisasi kepada siswa terkait kegunaan serta sasaran Program Indonesia Pintar serta bagaimana dana bantuan digunakan, agar memperoleh data siswa yang benar-benar layak dan memenuhi kriteria sebagai siswa penerima bantuan program Indonesia Pintar sehingga dapat meminimalisir dari permasalahan yang ada serta mengerti dalam penggunaan dana bantuan untuk hal-hal apa saja.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengontrol jalannya program Indonesia Pintar, mengawasi penggunaan dana program, serta pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar, agar tujuan serta sasaran dari program Indonesia Pintar dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Dinas Pendidikan memperbaiki komunikasi dengan meningkatkan sosialisasi serta pengontrolan langsung ke lapangan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, guna kelangsungan tujuan

serta sasaran Program Indonesia Pintar.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Subarsono, AG.2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal dan Skripsi

A, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMP Negeri 5 Kota Palopo.

Agata, w. (n.d.). Pengaruh Religiusitas Terhadap Gratitude Pada Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan Kristen.

Agitya, N. A. (2022). Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Bus Sekolah Dinas Perhubungan Unit Pengelola Angkutan Sekolah DKI Jakarta Berbasis Java.

Dini Haryati, F. G. (2020). Upaya Meningkatkan Kemampuan Belajar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Siswa Kelas V SDN No.198/IPasar Baru.

Febriana, R. B. (2018). Evaluasi Dampak Ekonomi Pelaksanaan Program Pengembangan

Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

Haqiqi, N. M. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Maelin, E. D. (2018). Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Marnita, P. H. (2021). Pengembangan LKPD berbasis HOTS Pada Pembelajaran Matematika Materi Volume Bangun Ruang Kelas V SDNegeri 91 Palembang.

Indra Franselski Sampe, L. K. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual.

Nugraha, A. F. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang.

Oktavianty, N. (2016). Pendekatan Evaluasi Menurut William Dunn (Studi Kasus Peremajaan Angkutan Kota di Kota Malang dengan Pendekatan Evaluasi Teori Keputusan).

Rajak, M. a. (2021). Pemanfaatan Dan Pengolahan Bambu Di Mebel Gurua Posiposi Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur.

Rizky, M. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SMP Negeri 11 Kota Jambi.

- Sanusi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kampung KB Di Kp. Kaduseeng Desa Talagasari Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.
- Sari, R. P. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Blimbing Kota Malang Dengan Model CIPPO.
- Setiawan, H. R. (2021). Manajemen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran.
- Ulfiyani. (2019). Konflik Sosial Dan Politik Dalam Novel The President Karya Mohamad Sobary.
- Wahyuni. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pemerintah Dalam Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
- Wanto, A. H. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City.
- Wicaksana, A. (2016). evaluasi kebijakan program indonesia pintar pada tingkat sekolah menengah atas di kecamatan tanjung lubuk kabupatenogon ilir.

(Diakses 10 Desember 2020)

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab VI pasal 13
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang pendidikan
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "APK/APM Kemdikbud dan Kemenag Indonesia".

Sumber internet

- <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Warni-T-Sumar-Analisis-Kebijakan-Pendidikan-Kajian-Teoretis-Eksploratif-dan-Aplikatif.pdf>
- http://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/jenjang_sekolah/081303/SMA?tahun=2020
- <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/begini-alur-pencatatan-di-dtks-agar-dapat-bantuan-pip>
- <http://spasial.data.kemdikbud.go.id/>